

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan keanekaragaman yang tersebar dari sabang sampai merauke dilihat dari sisi budaya, sosial, ekonomi, maupun sumber daya alam dan buatan. Jumlah kepadatan penduduk yang semakin meningkat berdampak terhadap permasalahan yang muncul yaitu ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan kesejahteraan sosial. Masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi karena mengarah pada terbatasnya peluang, ekonomi, keterampilan rendah, ketidakberdayaan, dan ketidakpastian hidup berkelanjutan. Kemiskinan berpengaruh terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat (Aditya Sudamardi, 2020).

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan sosial yang dialami oleh semua negara di dunia tidak hanya negara berkembang melainkan juga negara maju. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi kemiskinan dikarenakan populasi tumbuh lebih cepat dibandingkan daya tampung lapangan pekerjaan sehingga penduduk bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan terjadi saat ketidakmampuan keadaan ekonomi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan lainnya yang tidak memenuhi standar kualitas hidup (Aditya Sudamardi, 2020). Kemiskinan dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah yang berdampak pada rendahnya kualitas

pengembangan diri, wawasan, keterampilan, dan daya saing untuk mendapat pekerjaan.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Brebes	293.2	308.78	314.95	290.66
Kabupaten Banyumas	211.6	225.84	232.91	220.47
Kabupaten Kebumen	201.3	211.09	212.92	196.16
Kabupaten Pemalang	200.7	209.03	215.08	195.84
Kabupaten Cilacap	185.2	198.60	201.71	190.96
Kabupaten Grobogan	161.9	172.26	175.72	163.20
Kabupaten Magelang	137.4	146.34	154.91	145.33
Kabupaten Purbalingga	140.1	149.48	153.08	145.33
Kabupaten Klaten	144.1	151.83	158.23	144.87
Kabupaten Demak	137.6	146.87	151.74	143.01
Kabupaten Banjarnegara	136.1	144.95	150.19	141.25
Kabupaten Wonosobo	131.3	137.63	139.67	128.11
Kabupaten Pati	119	127.37	128.74	118.04
Kabupaten Sragen	113.8	119.38	122.91	115.14
Kabupaten Tegal	109.9	117.50	123.52	113.62
Kabupaten Wonogiri	98.3	104.37	110.46	105.19
Kabupaten Blora	97.9	103.73	107.05	99.83
Kabupaten Boyolali	93.7	100.59	104.82	97.18
Kabupaten Rembang	95.3	100.08	101.40	94.56
Kabupaten Kendal	91.2	97.49	100.00	93.03
Kabupaten Jepara	83.5	91.14	95.22	89.08
Kabupaten Karanganyar	84.5	91.72	95.41	88.56
Kabupaten Pekalongan	87	91.86	95.26	87.53
Kabupaten Purworejo	82.2	84.79	88.80	82.64
Kota Semarang	72	79.58	84.45	79.87
Kabupaten Semarang	73.9	79.88	83.61	78.60
Kabupaten Temanggung	72.6	77.33	79.09	73.04
Kabupaten Batang	64.1	70.57	74.91	69.94
Kabupaten Sukoharjo	63.6	68.89	73.84	68.72
Kabupaten Kudus	58	64.24	67.06	66.06
Kota Surakarta	45.2	47.03	48.78	45.94
Kota Pekalongan	20.2	22.16	23.49	21.81

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Kota Tegal	18.6	19.55	20.27	19.78
Kota Salatiga	9.2	9.69	10.14	9.45
Kota Magelang	9.1	9.27	9.44	8.65

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2023)

Berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Grobogan tergolong fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 172, 26 ribu, dan pada tahun 2021 meningkat mencapai 175,72 ribu. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Berbagai upaya bentuk penanggulangan pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal tersebut juga berkesinambungan dengan komitmen pemerintah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SGD's (*Sustainable Development Goals*). Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini memberikan peluang kepada masyarakat miskin agar meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program yang didasari peraturan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang memenuhi komponen sebagai persyaratan untuk terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS). Program PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 hingga saat ini jumlah keluarga penerima manfaat PKH dan anggaran terus mengalami peningkatan terlihat pada gambar di atas. Pelaksanaan program PKH ini diterapkan secara menyeluruh di 34 provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan(Kementerian Sosial, 2021).

Tabel 1.2
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) PerKecamatan
di Kabupaten Grobogan Tahun 2021 -2023

Kecamatan	Tahun					
	2021		2022		2023	
	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
Wirosasi	49,798	20,841	49,798	20,839	49,551	20,111
Tawangharjo	30,237	12,658	30,237	12,656	30,005	12,151
Grobogan	48,420	19,371	48,421	19,371	47,699	18,568
Purwodadi	57,721	24,558	57,722	24,551	57,285	23,751
Brati	26,953	11,379	26,953	11,378	26,584	10,976
Klambu	20,926	8,665	20,926	8,664	20,958	8,483
Godong	47,044	19,345	47,045	19,345	51,712	20,186
Gubung	47,260	18,950	47,260	18,947	46,433	18,059
Tegowanu	29,783	12,674	29,783	12,675	33,207	13,179
Tanggunharjo	23,502	9,655	23,501	9,653	24,147	9,486
Kedungjati	35,160	13,366	35,160	13,366	34,825	12,769
Karangayung	49,266	19,459	49,266	19,458	50,170	19,596
Penawangan	37,098	14,824	37,098	14,821	37,569	14,598
Toroh	56,581	23,277	56,581	23,275	57,377	23,336
Geyer	49,669	19,049	49,669	19,046	50,476	18,928
Pulokulon	68,387	26,262	68,387	26,258	67,572	25,289
Kradenan	43,655	17,319	43,655	17,318	43,555	16,917
Gabus	40,335	16,865	40,335	16,865	39,808	16,291
Ngaringan	45,500	18,517	45,500	18,515	44,936	17,934

Sumber: (Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2023) data diolah peneliti

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan serta potensi dan

sumber kesejahteraan sosial (PPID Kota Semarang, 2023). DTKS ini menjadi data acuan dalam program penanganan fakir miskin serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada data tabel 1.3 tersebut bahwa kecamatan yang memiliki jumlah DTKS posisi tertinggi setiap tahunnya yaitu Kecamatan Pulokulon dengan jumlah KK 26,262 terdapat jumlah warga 68,387 tahun 2021, pada tahun 2022 jumlah KK 26,258 terdapat jumlah warga 68,387 warga, sedangkan pada tahun 2023 jumlah KK 25,289 terdapat jumlah warga 67,572. Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai salah satu lokasi Program Keluarga Harapan sejak tahun 2014. Pada data Dinas Sosial Kabupaten Grobogan jumlah keluarga penerima manfaat PKH bersifat fluktuatif. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa tengah bahwa persentase rumah tangga program PKH di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga sebesar 13,30% dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 15,23% diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Setelah pasca pandemi, masih terjadi peningkatan di tahun 2022 sebesar 20,96%.

Tabel 1. 3
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan PerKecamatan di Kabupaten
Grobogan Tahun 2019-2022

Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Kedungjati	4016	1746	765	3882	3513	489	3882	3513	489	3882	3513	489
Karangrayung	9330	4804	3001	8614	3948	3062	8961	4187	3579	8961	4187	3579
Penawangan	5605	1997	1018	5436	2066	190	5403	1913	839	5259	2004	827
Toroh	9477	4410	2009	6063	2621	1612	6063	2621	1612	6063	2621	1612
Geyer	6728	2442	537	6728	2442	537	6274	2176	694	5665	2163	584
Pulokulon	8429	6945	2913	7447	2816	2614	6600	2571	1986	6600	2571	1986
Kradenan	7234	5692	2574	6878	3727	3449	6878	3727	3449	6680	3789	3933
Gabus	6225	3258	1016	6632	2772	1172	6640	2762	1148	6316	2814	1342

Kecamatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Ngaringan	6394	2074	172	6280	2048	119	6135	2053	119	5824	2075	119
Wirosari	8119	4147	4217	7475	4326	4540	8673	4131	4543	8717	4024	4824
Tawangharjo	5615	3483	899	4974	3691	1812	4885	2848	1760	5433	3026	1615
Grobogan	6835	3501	4091	6837	3503	3137	6760	3479	3181	6652	3418	2470
Purwodadi	13498	7239	9251	17780	17377	24222	17100	5916	10116	16837	7782	12419
Brati	3978	853	139	1644	1357	360	4699	1357	360	4080	1504	5254
Klambu	6180	2059	616	6248	1644	479	6248	1645	455	6248	1645	455
Godong	8313	2728	2868	8015	2894	3294	8922	2659	3368	7756	2687	3571
Gubug	8697	5628	7153	6412	2312	4004	7742	3590	6120	8734	5623	6623
Tegowanu	5211	2300	232	5169	2279	145	5525	2159	197	5311	2150	202
Tanggunharjo	3702	1174	442	3641	1227	335	3846	3513	366	3846	3513	366

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2019-2022)

Tampak bahwa data pendidikan Kecamatan Pulokulon tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jenjang SD/Sederajat sebanyak 8429 siswa, SMP/ Sederajat 6945 siswa, dan SMA/ Sederajat sebanyak 2913. Tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah pada jenjang SD/ Sederajat 7447 siswa, SMP /Sederajat 2816 siswa, SMA/Sederajat sebanyak 2614 siswa. Terjadi penurunan sampai tahun 2021 jenjang SD/ Sederajat sebanyak 6600 siswa, SMP/ Sederajat sebanyak 2571, dan SMA/ Sederajat sebanyak 1986 siswa.

Tabel 1. 4
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non PKH Komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon Tahun 2021 – 2022

Desa	Tahun 2021				2022			
	Jumlah				Jumlah			
	Non PKH	SD	SMP	SMA	Non PKH	SD	SMP	SMA
Jambon	601	64	47	104	1240	203	109	160
Jatiharjo	487	58	39	91	1250	228	101	155
Jetaksari	425	32	19	89	931	146	75	106
Karangharjo	858	164	87	158	1528	405	185	218

Desa	Tahun 2021				2022			
	Jumlah				Jumlah			
	Non PKH	SD	SMP	SMA	Non PKH	SD	SMP	SMA
Mangunrejo	722	106	79	153	1228	203	118	159
Mlowokarangtalun	550	52	27	84	1087	158	81	105
Panunggalan	932	133	65	166	1645	388	154	216
Pojok	884	142	88	128	1462	276	156	190
Pulokulon	859	108	76	142	1626	310	179	229
Randurejo	438	36	24	71	921	110	47	80
Sembungharjo	833	150	72	107	1340	286	133	194
Sidorejo	934	81	69	159	1889	279	129	189
Tuko	960	113	60	172	1848	363	190	220

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa DTKS khususnya Non PKH komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon merupakan data yang belum mendapatkan bansos PPKH namun sudah masuk DTKS memiliki komponen pendidikan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan tahun 2021.

Tabel 1. 5
Data Keluarga Penerima Manfaat PKH komponen pendidikan
di Kecamatan Pulokulon Tahun 2021-2022

Desa	Tahun 2021				Tahun 2022			
	Jumlah				Jumlah			
	Penerima	SD	SMP	SMA	Penerima	SD	SMP	SMA
Jambon	434	210	148	139	414	207	151	92
Jatiharjo	223	112	61	43	197	103	51	22
Jetaksari	282	120	83	68	241	104	64	38
Karangharjo	500	257	156	128	483	259	149	117
Mangunrejo	314	149	86	77	292	136	86	59
Mlowokarangtalun	332	131	104	53	321	132	104	34
Panunggalan	350	164	116	103	315	139	108	99
Pojok	549	262	172	102	524	261	172	79
Pulokulon	501	253	166	145	463	235	152	113
Randurejo	226	91	74	25	222	90	73	19
Sembungharjo	453	260	165	129	412	249	149	80
Sidorejo	479	254	127	80	465	247	128	63
Tuko	390	175	119	87	362	175	115	62

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2023

Keluarga penerima manfaat merupakan penerima bantuan syarat tunai PKH. Berdasarkan data tersebut partisipasi anak penerima PKH komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon yang mengenyam pendidikan masih rendah, mayoritas menempuh jenjang SD/Sederajat sedangkan jenjang SMP dan SMA/Sederajat masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kualitas sumber daya pengetahuan serta daya saing yang dimiliki sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan di masa mendatang. Mengenai bantuan PKH ini menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah setempat agar tanggap terhadap aspirasi warga untuk dapat melakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur Program Keluarga Harapan sehingga dapat membantu kesejahteraan sosial warga.

Gambar 1. 1
Berita Penyalahgunaan Bantuan PKH di Kecamatan Pulokulon



Grobogan (Sigi Jateng) – Permasalahan pencairan Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukan pada Keluarga Penerima Harapan (KPM) di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah tidak kunjung selesai.

Sejauh ini masih ada dugaan penyimpangan yang berasal dari tubuh para Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri.

Seperti halnya yang terjadi belum lama ini terjadi di Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan tentang penggelapan uang bansos milik para KPM yang dilakukan oleh Petugas PKH berinisial Is, meski sudah dilaporkannya ke pihak Kepolisian Grobogan, namun juga belum ada tanda tanda keberlanjutan kasus tersebut.

Dalam penelusuran sigijateng.id, juga didapatkan adanya dugaan penyimpangan berupa Pungutan Liar (Pungli) di kecamatan Pulokulon dengan dalih berbagai cara yang dilakukan oleh para oknum PKH.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Indri Agus melalui Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial mengatakan, permasalahan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum PKH, pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, mengingat hal tersebut juga ada keterkaitannya dengan KPM atau warga, sehingga pihaknya juga melakukan investigasi dengan turun ke desa. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak ada lagi terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum.

"Permasalahan ini sedang kami tindak lanjuti berupa pembinaan terhadap oknum PKH, saat ini kami langsung melakukan investigasi ke desa. Hal ini agar tidak terjadi dengan adanya peristiwa yang sama" terangnya. (gik)

Sumber: (Sugiono, 2024) <https://sigijateng.id/2024/ada-pungli-bansos-di-pulokulon-grobogan-begini-pengakuan-para-oknum-pkh>

Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat PKH di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang belum memahami bantuan PKH di data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditinjau oleh desa/kelurahan setempat. Sebagaimana ada warga yang sesuai komponen PKH belum masuk dalam kategori penerima keluarga manfaat PKH maka dapat berkoordinasi ke desa agar dimasukkan ke DTKS. Sehubungan dengan penelitian terdahulu (Rachma Maulida, 2022) bahwa masih rendahnya partisipasi dan pemahaman pola pikir keluarga penerima manfaat mengenai program bantuan keluarga harapan karena pendamping PKH yang diperlakukan kurang baik oleh orang tua, dianggap

mengguri pada saat memberikan audiensi. Penelitian lain oleh (Oktarina Vivi, 2022) bahwa kurangnya sosialisasi mengenai program keluarga harapan sehingga banyak warga miskin belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial baik non KPM maupun calon KPM.

Tabel 1. 6
Rekap Data PKH Penyaluran PerKecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2021

KECAMATAN	KPM	TOTAL NOMINAL	JML KPM SALUR	NOMINAL KPM SALUR	JML KPM BELUM SALUR	NOMINAL BELUM SALUR
Brati	2,340	1,546,950,000	2,327	1,538,500,000	13	8,450,000
Gabus	4,017	2,649,000,000	3,987	2,629,375,000	30	19,625,000
Geyer	4,978	3,331,525,000	4,958	3,318,725,000	20	12,800,000
Godong	3,183	2,164,400,000	3,138	2,136,725,000	45	27,675,000
Grobogan	5,053	3,333,575,000	5,027	3,318,500,000	26	15,075,000
Gubug	3,094	2,127,875,000	3,072	2,114,350,000	22	13,525,000
Karangrayung	4,030	2,682,750,000	4,003	2,665,450,000	27	17,300,000
Kedungjati	2,881	1,958,450,000	2,863	1,948,325,000	18	10,125,000
Klambu	1,761	1,136,675,000	1,738	1,122,725,000	23	13,950,000
Kradenan	3,995	2,649,150,000	3,963	2,628,900,000	32	20,250,000
Ngaringan	4,367	2,818,775,000	4,333	2,803,350,000	34	15,425,000
Penawangan	3,091	2,149,375,000	3,075	2,139,600,000	16	9,775,000
Pulokulon	5,276	3,506,300,000	5,255	3,493,725,000	21	12,575,000
Purwodadi	4,215	2,789,100,000	4,181	2,768,350,000	34	20,750,000
Tanggunharjo	1,783	1,211,125,000	1,769	1,203,800,000	14	7,325,000
Tawangharjo	2,749	1,828,950,000	2,720	1,811,325,000	29	17,625,000
Tegowanu	2,501	1,610,575,000	2,479	1,598,000,000	22	12,575,000
Toroh	4,441	2,796,025,000	4,418	2,784,325,000	23	11,700,000
Wirosari	4,584	3,016,125,000	4,559	3,004,600,000	25	11,525,000
Grand Total	68,339	45,306,700,000	67,865	45,028,650,000	474	278,050,000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa masih terdapat penyaluran bantuan PKH yang belum tersalur secara optimal salah satunya penyaluran di Kecamatan Pulokulon.

Tujuan dari adanya kebijakan PKH untuk menciptakan perubahan perilaku dan

kemandirian, namun tidak semua warga mencapai perubahan kemandirian. Kemandirian ini diartikan sebagai berakhirnya status KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah stabil dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Kemandirian KPM bagi warga yang mempunyai usaha pribadi dan mundur dari PKH dapat disubsidi oleh pemerintah, sedangkan KPM yang tidak memiliki usaha tidak akan mendapat subsidi kemandirian. Berikut data jumlah KPM graduasi mandiri yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan:

Tabel 1.7
Jumlah KPM Graduasi Mandiri PerKecamatan di Kabupaten Grobogan

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Brati	7	34	11
Gabus	12	297	14
Geyer	0	61	20
Godong	0	74	48
Grobogan	0	20	18
Gubug	1	47	26
Karangayung	0	68	23
Kedungjati	0	2	22
Klambu	0	34	4
Kradenan	3	71	24
Ngaringan	3	302	13
Penawangan	4	184	29
Pulokulon	0	125	46
Purwodadi	14	32	28
Tanggunharjo	0	100	11
Tawangharjo	0	78	41
Tegowanu	0	9	14
Toroh	1	52	70
Wirosari	0	131	23

Sumber : (Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2023) data diolah peneliti

Pada tabel di atas, graduasi KPM tersebut yang lepas dari bantuan PKH dikarenakan memiliki usaha pribadi dan sudah dapat meningkatkan perekonomian rumah tangganya, serta adanya KPM yang dikeluarkan karena tidak memenuhi komponen persyaratan program keluarga harapan. Berdasarkan tabel tersebut graduasi KPM PKH di Kecamatan Pulokulon tahun 2021 mencapai 125 KPM yang telah graduasi, dan tahun 2022 hanya mencapai 46 KPM. Masih banyak KPM yang belum mencapai tahap kemandirian ekonomi di Kecamatan Pulokulon. Penelitian terdahulu dengan temuan Kurniawan Ade (2021) yang mengatakan masih banyak KPM yang tidak ingin graduasi atau mencopot statusnya karena masih ketergantungan terhadap bantuan PKH.

Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang mendampingi keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Grobogan masih belum memadai. Hal ini disebabkan optimalnya setiap pendamping mendampingi 250 keluarga penerima manfaat namun dalam realisasinya setiap pendamping mendampingi lebih dari 250 keluarga penerima manfaat. Berikut data sumber daya manusia pendamping program keluarga harapan di Kecamatan Pulokulon.

Tabel 1. 8
Data Pelaksana PKH di Kabupaten Grobogan

No	Jabatan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketua Pelaksana PKH	1	1	1	1	1
2	Koordinator PKH Kabupaten Grobogan	3	3	3	3	3
3	Koordinator PKH Kecamatan	19	19	19	19	19

No	Jabatan	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Pendamping Kecamatan Karangayung	13	12	12	12	12
5	Pendamping Kecamatan Grobogan	17	15	14	14	13
6	Pendamping Kecamatan Gabus	12	12	11	11	12
7	Pendamping Kecamatan Purwodadi	12	13	13	15	17
8	Pendamping Kecamatan Kedungjati	6	6	6	6	6
9	Pendamping Kecamatan Ngaringan	14	14	15	15	14
10	Pendamping Kecamatan Gubug	8	8	9	9	11
11	Pendamping Kecamatan Toroh	12	23	14	15	17
12	Pendamping Kecamatan Tegowanu	7	7	6	7	7
13	Pendamping Kecamatan Pulokulon	20	20	20	22	22
14	Pendamping Kecamatan Godong	7	7	7	7	9
15	Pendamping Kecamatan Geyer	12	13	14	13	13
16	Pendamping Kecamatan Kradenan	13	14	14	14	16
17	Pendamping Kecamatan Tanggungharjo	5	5	4	4	5
18	Pendamping Kecamatan Klambu	5	5	5	5	5
19	Pendamping Kecamatan Brati	7	8	8	8	9
20	Pendamping Kecamatan Wirosari	15	15	14	14	15
21	Pendamping Kecamatan Tawangharjo	10	10	12	12	10
22	Pendamping Kecamatan Penawangan	11	10	9	19	13

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pendamping PKH Kabupaten Grobogan semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah pendamping di Kecamatan Pulokulon mencapai 20 orang, dan tahun 2020 mencapai 20 orang. Peran pendamping sangat penting dalam program Keluarga Harapan akan tetapi masih terdapat ketimpangan dalam beban kerja untuk mendampingi para KPM PKH. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Rachma Maulida, 2022) bahwa keterbatasan jumlah pendamping PKH Pendamping mempengaruhi proses keberjalanan kebijakan dikarenakan jumlah binaan setiap pendamping tidak terbagi dengan rata yang menyebabkan hambatan terbesar dalam pendampingan. Sejalan dengan penelitian terdahulu (Kurniawan Ade, 2021) bahwa jumlah pendamping yang masih kurang di Kecamatan Karawang Barat hanya ada 16 pendamping mendampingi lebih dari 200 KPM bahkan sampai 400 KPM menyebabkan sosialisasi mengenai penyaluran dana bantuan PKH belum optimal. Selaras dengan penelitian terdahulu oleh Rosdiana (2020) bahwa PKH di Kecamatan Linggang Bigung masih kurang dalam sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan karena tidak ada fasilitas ruangan memadai kegiatan PKH dan sumber daya manusia belum memadai jumlahnya harus mendampingi 11 Desa.

Tabel 1. 9
Daftar Sarana dan Prasarana Pelaksanaan PKH Tahun 2020-2023

No	Nama	Jumlah
1	Komputer	1
2	Print	1
3	Flipchart	2
4	Buku saku	22

Sumber: Pendamping PKH Kecamatan Pulokulon, 2023

Berdasarkan tabel 1.5 bahwa jumlah sarana dan prasarana masih minim dapat dilihat jumlah komputer dan print yang dimiliki hanya satu. Sedangkan, flipchart berjumlah dua, dan jumlah 22 buku saku pendamping PKH yang bertugas di Kecamatan Pulokulon. Peran pendampingan sangat penting dalam proses pelaksanaan PKH saat ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dapat menghambat Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang tepat dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata terutama menempuh pendidikan yang layak terutama kebijakan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam menilai keberhasilan kebijakan program keluarga harapan sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Partisipasi anak-anak penerima PKH di jenjang pendidikan masih rendah
2. Sumber daya manusia pendamping PKH masih belum memadai
3. Terbatasnya pemahaman keluarga penerima manfaat tentang program keluarga harapan
4. Keluarga penerima manfaat yang ketergantungan terhadap bantuan PKH

5. Sarana dan prasarana pelaksanaan penunjang kegiatan program keluarga harapan belum memadai

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keberhasilan kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan keberhasilan kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
2. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan serta pengetahuan ilmu administrasi publik mengenai evaluasi kebijakan program keluarga harapan yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri terjun ke dunia masyarakat dan menghadapi dinamika dalam proses kebijakan publik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai evaluasi kebijakan program keluarga harapan yang diterapkan sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi serta pelayanan yang diberikan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Pulokulon dalam pengembangan program keluarga harapan yang terjadi saat ini maupun di masa mendatang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang baik dan berkualitas maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Ade (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang” Metode penelitian ini kualitatif dengan studi kasus. Teori yang digunakan evaluasi kebijakan Dunn dengan enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. Hasil dari penelitian ini indikator efektivitas dan kecukupan sudah optimal, ditemukan kendala yang ditemui yaitu tidak merata persebaran bantuan PKH, kurangnya sumber daya PKH, dan pola pikir keluarga penerima manfaat masih sulit diubah.

Penelitian yang dilakukan Amalia & Rachmatullah Putra (2023) judul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Malang (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)” Metode penelitian ini kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian menganalisa evaluasi serta aspek pendukung serta aspek penghambat kebijakan program keluarga harapan di Kota Malang. Teori yang digunakan evaluasi kebijakan Dunn ada enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan program keluarga harapan di Kota Malang berjalan cukup baik namun masih ditemukan permasalahan pada kriteria

efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan. Hambatan yang ditemui masyarakat masih belum memahami alat bayar dalam mengurus pencairan dana, masyarakat penerima bantuan PKH tidak mendapatkan undangan bantuan dari kantor pos, ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima, DTKS belum ada pembaruan, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan bagi warga kurang mampu, pola pikir masyarakat sulit diubah, dan sistem DTKS yang baru sehingga banyak peserta PKH dikeluarkan *by sistem* tanpa konfirmasi.

Penelitian yang dilakukan Rosdiana (2020) judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Linggang Bigung dan mengetahui faktor penghambat maupun pendukung PKH. Teori yang digunakan teori evaluasi William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini bahwa evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan namun ada beberapa kendala yang segera diperbaiki.

Penelitian yang dilakukan Oktarina Vivi (2022) judul “Evaluasi Konteks Program Keluarga Harapan di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar” Metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan evaluasi program keluarga harapan di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan evaluasi konteks Stufflebeam diantaranya

kebutuhan yang harus dipenuhi program, kelemahan dan kekuatan program, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan evaluasi PKH. Hasil penelitian ini bahwa evaluasi program ini belum optimal masih ditemukannya permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya sosialisasi mengenai program keluarga harapan sehingga banyak warga rentan miskin belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Najidah (2019) dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. Metode penelitian ini metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas program PKH di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang. Teori yang digunakan efektivitas program menurut Makmur ada 4 kriteria yaitu ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan biaya, ketepatan berfikir. Hasil penelitian ini bahwa dalam kriteria ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan biaya program keluarga harapan (PKH) belum sepenuhnya efektif, terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang menghambat efektivitas program adalah koordinasi belum optimal, belum maksimalnya perencanaan dan ketepatan pelayanan.

Penelitian yang dilakukan Rachma Maulida (2022) judul “Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin” Metode yang digunakan kualitatif. Tujuan penelitian menemukan hambatan pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Pelambuan. Teori yang digunakan Mazmanian dan Sabatier dengan kriteria kesulitan teknis. Hasil penelitian ditemukan hambatan

pelaksanaan secara internal terhadap pendataan calon KPM PKH, proses pemutakhiran data lama, kendala penyaluran bantuan distribusi kartu kesejahteraan sosial dan eksternal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program keluarga harapan, serta hambatan pendamping sosial kurangnya ketersediaan sumber daya manusia pendamping PKH.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Darmadi et al. (2021) berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Metode penelitian ini kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses serta kendala dalam implementasi PKH di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan Edward III terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi sudah dilakukan dengan cukup baik namun kendala yang ditemui faktor politik dan konflik masih terjadi rumitnya garis koordinasi.

Penelitian oleh Ayu Nurandani & Utoyo Sutiyoso (2022) berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung”. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan evaluasi kebijakan William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menemukan efektivitas dan kecukupan berjalan dengan baik, ada kendala dalam efisiensi waktu penyaluran, pemerataan target sasaran belum maksimal, responsivitas memecahkan masalah

teknis masih lambat, dan ketepatan dalam kemandirian belum optimal. Penghambat lainnya yang ditemukan masalah valid data dan sulitnya pola pikir KPM PKH.

Penelitian oleh Nurrohmah & Rahaju (2019) berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto”. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Teori yang digunakan evaluasi menurut William Dunn, hasil penelitian bahwa indikator responsivitas dan efektivitas yang sudah memenuhi. Sedangkan dari indikator efisien, ketepatan, kecukupan, pemerataan masih belum memenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiqar Bin Tahir et al. (2021) berjudul “*Inhibiting Factors (Internal&External) Implementation of the Family Hope Program in Bone Regency*” Metode yang digunakan penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di Kabupaten Bone yaitu faktor internal diantaranya belum tepat sasaran penerima bantuan, sedangkan faktor eksternal kurang dukungan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pelaksanaan PKH, akses wilayah yang masih sulit dijangkau oleh pendamping PKH.

Penelitian oleh Patel-Campillo et al. (2022) berjudul “*Breaking the poverty cycle? Conditional cash transfers and higher education attainment*” Metode penelitian kuantitatif menggunakan uji perbedaan. Tujuan penelitian ini menganalisis pencapaian pendidikan dengan menilai dampak program nasional

bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat miskin di Peru berdasarkan gender. Kesimpulan penelitian ini bahwa program bantuan tersebut memiliki dampak positif bagi siswa untuk melanjutkan studi, namun dampak ini hanya dirasakan oleh laki-laki sehingga masih ada kesenjangan gender dalam pencapaian pendidikan tinggi di antara penerima bantuan tunai bersyarat. Perlunya program ini ditingkatkan kembali untuk mengatasi ketidaksetaraan gender bagi anak perempuan dalam mencapai pendidikan tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan” memiliki kemiripan fokus dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan yaitu mengenai Program Keluarga Harapan. Peneliti kesulitan untuk mencari penelitian terdahulu bersumber jurnal internasional terkait dengan evaluasi kebijakan program keluarga harapan, maka peneliti mencari penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu nasional mempunyai tujuan mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan program keluarga harapan pada Dinas Sosial. Penelitian terkait evaluasi kebijakan program keluarga harapan pada penelitian terdahulu keseluruhan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti akan menggunakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam memberikan gambaran obyektif tentang keadaan fenomena yang diteliti, data yang diperoleh dari fakta-fakta dijelaskan secara sistematis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian terhadap komponen PKH, tahun dilaksanakan penelitian, tempat

penelitian, serta teori yang digunakan peneliti yaitu teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn dan hambatan pelaksanaan kebijakan menurut Rachma Maulida.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik yang dikemukakan oleh Chandle dan Plano dalam (Pasolong, 2014) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut pandangan lain oleh Nicholas Henry dalam (Keban, 2014) bahwa administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Pengertian administrasi publik juga dikemukakan oleh David H. Rosenbloom (2005) dalam (Pasolong, 2014) bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Penjabaran beberapa ahli yang disampaikan tersebut, penulis mencoba menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses interaksi yang dinamis di antara unit-unit organisasi baik secara teori dan proses manajemen

formal maupun informal berkaitan dengan peraturan hak, kewajiban, tugas, dan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam (Keban, 2014) mengungkapkan administrasi publik memiliki 6 paradigma yaitu

1) Paradigma 1 (Dikotomi Politik dan Administrasi) 1900-1926

Tokoh terkenal dalam dikotomi politik administrasi adalah Frank J. Goodnow dan Leonald D. White menyebutkan politik harus memusatkan pada kebijakan dari kehendak masyarakat. Pada paradigma ini ditekankan pada aspek lokus saja yaitu birokrasi pemerintahan. Fokus atau metode yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas.

2) Paradigma 2 (Prinsip-prinsip administrasi) 1927-1937

Tokoh dalam paradigma ini yaitu Willoughby, Gullick & Uwick, Fayol, dan F.W Taylor menyebutkan bahwa prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Adapun prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick adalah POSDCORB (*Planning, Organization, Staffing, Directing, Reporting, Budgeting*) yang menurut mereka dapat digunakan secara universal sedangkan lokusnya tidak pernah diungkapkan secara jelas.

3) Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik) 1950-1970

Morstein Marx editor buku "*Elements of Administration*" tahun 1946 mempertanyakan pemisahan antara administrasi dan politik itu mustahil atau tidak realistis, sementara Hebert Simon memberikan kritiknya prinsip administrasi yang tidak konsisten dan menilai tidak dapat diterapkan secara

universal. Konsekuensi dari pertentangan tersebut munculnya paradigma baru yang beranggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik sebagaimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi kabur karena prinsip administrasi publik terdapat kelemahan.

4) Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi) 1956-1970

Pada paradigma ini prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokus dari paradigma ini yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern dan riset operasi. Model tersebut berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan pembangunan menuju kebijakan publik.

5) Paradigma 5 (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara) 1970-saat ini

Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas, dalam model ini fokus administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen serta kebijakan publik sedangkan lokusnya masalah kepentingan publik.

6) Paradigma 6 (*Governance*) 1990-Sekarang

Paradigma ini merupakan paradigma terakhir yaitu *governance* mempunyai arti sebagai pelaksana kekuasaan atau otoritas oleh penguasa politik dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dan memiliki proses yang rumit sehingga masyarakat yang memiliki kewenangan menyebarluaskan dan melaksanakan kebijakan publik secara langsung yang

berdampak kepada warga negara ataupun lembaga dapat mempengaruhi juga terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan menurut James Anderson dalam (Winarno, 2012) bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi masalah. Menurut Carl Friedrich dalam (Winarno, 2012) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu yang dihadapkan adanya hambatan dan kesempatan tertentu sehingga kebijakan diusulkan agar mencapai tujuan yang dimaksud. Pandangan Friedrich ini mencakup dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah melainkan juga kelompok maupun individu. Pendapat lain oleh Dunn dalam (Nugroho, 2006) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah bertujuan menjawab tantangan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Woll dalam (Sawir, 2021) mengemukakan kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung dan melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R. Dye dalam (Pasolong, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dikerjakan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan tindakan sejumlah aktor pemerintah untuk mengatasi masalah dengan tujuan perubahan yang diinginkan seringkali sifatnya

mengikat publik. Menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014) mendefinisikan kebijakan publik adalah strategi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan tujuan memecahkan masalah publik. Penjabaran beberapa ahli yang disampaikan tersebut, penulis mencoba menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan publik

1.6.4.1 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Michael Howler dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2011) terdapat tahapan kebijakan publik yaitu

- a. Penyusunan Agenda, suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi Kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan, ketika pemerintah memilih untuk menindaklanjuti suatu kebijakan.
- d. Implementasi Kebijakan, proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil dan capaian sasaran.
- e. Evaluasi Kebijakan, proses untuk menilai hasil dari kebijakan dapat berupa penilaian kinerja dan target kebijakan.

Menurut Ripley dalam (Subarsono, 2011) tahapan kebijakan publik diantaranya yaitu

- a. Penyusunan agenda

Pada penyusunan agenda perlu membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa suatu fenomena merupakan masalah publik, membuat batasan masalah, memobilisasi dukungan dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan politik, serta melalui publikasi.

b. Formulasi dan legitimasi kebijakan

Pada tahap ini perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi berkaitan masalah publik, kemudian membangun dukungan serta negosiasi sehingga sampai pada kebijakan yang dipilih.

c. Implementasi kebijakan

Tahap ini memerlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.

d. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang sudah dilaksanakan akan dilakukan proses evaluasi yang bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa mendatang.

Menurut Wiliam Dunn dalam (Sawir, 2021) ada beberapa tahapan kebijakan diantaranya yaitu:

a. Penyusunan agenda

Beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan untuk dilihat seberapa fokus penanganannya dalam jangka waktu ke depan, sebaliknya ada masalah yang ditunda dengan alasan-alasan tertentu.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan lalu dibahas oleh pemangku kebijakan untuk dicari pemecahan masalah dengan alternatif yang terbaik.

c. Adopsi kebijakan

Beberapa banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan akhirnya dipilih salah satu kebijakan diadopsi dengan dukungan dari legislatif, dan konsensus antar lembaga.

d. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini suatu kebijakan dilaksanakan, berbagai badan administrasi maupun pemerintah di tingkat bawah terlibat dalam implementasi kebijakan.

e. Evaluasi kebijakan

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut Lester dan Stewart dalam (Budi Winarno, 2007) membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua peran. Peran yang pertama menentukan konsekuensi apa saja yang dihasilkan dari kebijakan yang terlaksana dengan cara penggambaran dampak yang diakibatkan. Peran kedua untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan yang telah dilaksanakan menggunakan *standard* yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran pertama berfokus pada program kebijakan publik yang telah tercapai sesuai dengan tujuan atau tidak. Dan jika tidak tercapai, apa saja faktor yang menyebabkan kendala

tersebut. Peran kedua berfokus pada penilaian suatu keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan apakah mendapatkan dampak yang diharapkan.

Menurut William Dunn dalam (Leo Agustino, 2016) secara umum bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai serta manfaat dari hasil kebijakan. Pendapat lain oleh Anderson dalam (Budi Winarno, 2007) mengemukakan bahwa evaluasi sebagai proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Stufflebeam dalam (Firyal Akbar, 2018) bahwa evaluasi adalah suatu proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk menentukan alternatif keputusan. Menurut Wirawan dalam (Firyal Akbar, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi sebagai riset pengumpulan, analisis, dan menyajikan informasi bermanfaat terkait objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan indikator dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Penjabaran beberapa ahli yang disampaikan tersebut, penulis mencoba menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan publik mencapai tujuan dan sasaran diinginkan.

1.6.5.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2011) dalam (Pahrudin HM, 2023) perlunya evaluasi kebijakan berfungsi sebagai:

- a. Upaya mengetahui tingkat efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.
- b. Mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

- c. Bagian dari pemenuhan aspek akuntabilitas publik dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik.
- d. Menunjukkan pada pemangku kepentingan manfaat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Dapat menjadi pelajaran di masa mendatang supaya tidak mengulangi hal yang sama lagi.

Menurut Wibawa dalam (Nugroho, 2009) bahwa evaluasi kebijakan publik terdapat empat fungsi diantaranya:

- a. Eksplanasi, yaitu fungsi yang dapat melihat bagaimana realitas pelaksanaan program serta dapat dibuatkan suatu generalisasi mengenai hubungan antar realitas lainnya dalam mendorong keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.
- b. Kepatuhan, yaitu fungsi yang dapat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun aktor lainnya sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, yaitu fungsi yang dapat mengetahui apakah output yang dihasilkan sesuai dengan ditujukan pada kelompok sasaran kebijakan atau justru terdapat kebocoran maupun penyimpangan.
- d. Akunting, yaitu fungsi yang dapat mengetahui dampak dan akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

1.6.5.2 Model Evaluasi Kebijakan

James E. Anderson (2003) dalam (Budi Winarno, 2012) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penilaian sebuah

kebijakan termasuk dari isi dan dampak dari kebijakan tersebut. Tipe evaluasi kebijakan menurut Anderson terdapat tiga yaitu

- a. Evaluasi Fungsional merupakan tipikal evaluasi yang berfokus pada kegiatan evaluasi yang memberikan pertimbangan berupa bukti-bukti yang dipengaruhi oleh ideologi, *stakeholder*, dan kriteria lainnya.
- b. Evaluasi proses merupakan tipikal evaluasi yang berfokus pada efisiensi kebijakan dan program-program yang dibuat.
- c. Evaluasi sistematis merupakan evaluasi yang melihat dan mengukur dampak serta tujuan kebijakan dan program-program yang dibuat secara objektif.

1.6.5.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Pendekatan evaluasi kebijakan menurut William Dunn dalam (Leo Agustino, 2016) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- a. Evaluasi Semu, merupakan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat dari hasil kebijakan tersebut.
- b. Evaluasi Formal, merupakan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai sebuah kebijakan yang sudah dikerjakan.
- c. Evaluasi Keputusan Teoritis, merupakan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh informasi secara akurat dan valid sehingga dapat digunakan untuk pemangku kepentingan atau kebijakan.

Tabel 1.10
Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk Utama
Evaluasi semu	Untuk memperoleh keterangan informasi berdasarkan data dan fakta yang ada dari hasil kebijakan	Standar untuk nilai dan manfaat suatu kebijakan dapat dibuktikan dengan sendirinya dan tidak bersifat kontroversial.	• Eksperimental sosial • Akuntansi sistem sosial • Pemeriksaan sosial • Sintesis riset dan praktik
Evaluasi formal	Untuk memperoleh keterangan informasi yang aktual dan faktual tentang hasil kebijakan yang dipublikasikan secara resmi.	Sasaran dan tujuan dari aktor selaku pemangku kebijakan merupakan tolak ukur yang tepat dari nilai dan manfaat.	• Evaluasi perkembangan • Evaluasi eksperimental • Evaluasi proses retrospektif • Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi keputusan teoritis	Untuk memperoleh keterangan informasi yang aktual dan faktual serta memiliki urgensi yang dapat dipergunakan oleh pemangku jabatan.	Sasaran dan tujuan dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun tidak adalah ukuran yang tepat dari manfaat dan nilai.	• Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi • Analisis utilitas multi atribut

Sumber: (Leo Agustino, 2016)

1.6.5.4 Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dunn (2003) dalam (Subarsono, 2011) suatu kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator evaluasi yaitu

- a. Efektivitas berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dari suatu tindakan. Ukuran efektivitas merupakan standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang dicapai. Setelah pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampaknya mampu memecahkan

permasalahan yang tengah dihadapi berhasil atau gagal, suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek namun setelah melalui proses tertentu.

- b. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan kebijakan tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas dengan biaya terkecil disebut dengan efisien.
- c. Kecukupan merupakan seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dalam memecahkan masalah. Kriteria ini berkenaan dengan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan dalam memecahkan masalah yang terjadi.
- d. Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang menunjuk pada distribusi dan manfaat kepada sasaran kebijakan.
- e. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dilihat melalui tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau penolakan.
- f. Ketepatan merupakan kriteria yang berhubungan dengan rasionalitas dari manfaat suatu kebijakan. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program.

Tabel 1.11
Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan?

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan preferensi atau nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar bermanfaat?

Sumber:(Subarsono, 2011)

1.6.6 Kemiskinan

Menurut Schiller (Schiller) dalam (Tamana, 2018) bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh barang serta pelayanan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapat lain Levitan (1966) dalam (Tamana, 2018) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan dalam mencapai kualitas standar hidup layak. Kemiskinan menurut (Kuncoro M, 2000) dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut sebagaimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif berhubungan dengan masalah distribusi pendapatan sebagaimana pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan tertentu. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan, melainkan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu.

Menurut Mubyarto dalam (Murdiyana et al. 2017) mengemukakan kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud

dalam bentuk rendahnya pendapatan karena disebabkan rendahnya kemampuan, produktivitas, dan terbatasnya kesempatan daya saing dalam pembangunan. Menurut bank dunia bahwa garis kemiskinan Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita seseorang, sebagaimana penduduk berpendapatan perkapita kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional termasuk kategori miskin.

Pandangan Drs. H. Muslim Kasim dalam bukunya berjudul *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya* (Renna, 2022) datangnya akar masalah kemiskinan di Indonesia terbagi dalam 4 faktor yaitu kelangkaan aset, kelangkaan kesempatan kerja, sumber daya manusia yang terbatas, dan akses yang belum merata. Pandangan lain disampaikan Gunawan Sumodiningrat dalam (Arifin, 2020) bahwa sebab kemiskinan bukan dari permasalahan kesejahteraan namun dari faktor tertutupnya akses kesempatan kerja, tingginya rasio ketergantungan, masalah ketidakpercayaan, serta kerentanan faktor alam.

Konsep kemiskinan yang berkembang menurut Nasikun dalam (Suryawati, 2005) bahwa terbagi menjadi empat sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan Absolut yaitu kondisi masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Kemiskinan Relatif yaitu kondisi kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan pendapatan.

- 3) Kemiskinan Kultural yaitu situasi kemiskinan yang disebabkan faktor budaya seperti tidak ada kemauan dalam berusaha atau belajar meskipun ada bantuan dari pihak luar
- 4) Kemiskinan Struktural yaitu situasi yang disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya sehingga cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Pandangan Sharp, e.al (Kuncoro M, 2000)dalam (Jayadi, 2016) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu pertama secara mikro, bahwa kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya sehingga menyebabkan distribusi yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak terhadap produktivitas rendah dan upah pendapatan rendah yang disebabkan karena rendahnya pendidikan, diskriminasi. Ketiga, kemiskinan timbul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut David Cox dalam (Sidiq, 2019) bahwa terdapat beberapa dimensi penyebab kemiskinan yaitu

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi, kemajuan era globalisasi dirasakan oleh semua negara di dunia baik negara maju dan negara berkembang. Namun, persaingan dan perdagangan di negara maju lebih pesat sehingga negara berkembang jumlah kemiskinannya semakin meningkat.
2. Kemiskinan yang berhubungan dengan pembangunan, pembangunan di perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan karena pemerataan yang tidak

selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan kondisi kemiskinan di mana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.

3. Kemiskinan sosial, dilihat dari kondisi sosial masyarakat di dalam suatu kelompok akibat dari diskriminasi, bias gender, atau eksploitasi ekonomi.
4. Kemiskinan konsekuensial, berdasarkan faktor-faktor eksternal yaitu konflik, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk.

Pandangan Cox lebih luas karena terdapat dimensi globalisasi sebagaimana tingkat kemiskinan di suatu negara dapat disebabkan oleh perkembangan perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap pembangunan di suatu negara.

1.6.7 Pendidikan

Ki Hadjar Dewantara dalam (Jamaludin & Hayati, 2020) mengemukakan bahwa pendidikan penting dalam mendukung siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta dengan pengetahuan yang diperoleh dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan masyarakat. Pendidikan memberikan peningkatan rasa percaya diri dalam mengembangkan potensi yang ada.

John Locke dalam (Renna, 2022) pendidikan merupakan sebuah pengalaman yang dialami setiap manusia karena pengembangan karakter kepribadian dari manusia itu sendiri. Karakter yang dibentuk melalui pengalaman akan membawa seseorang kepada suatu pola pemahaman serta relasi yang baik.

Bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan namun terhalang karena ekonomi keluarga yang kurang memadai untuk menunjang kebutuhan anak

sekolah sehingga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat mengenai kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya Program Keluarga Harapan bagi keluarga yang miskin dapat menempuh pendidikan yang layak dan bagus.

1.6.8 Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial dalam bentuk sosial sebagai upaya pemerintah dalam percepatan pengentasan angka kemiskinan. Dalam dunia internasional program ini dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Indonesia sudah menerapkan program ini sejak tahun 2007, sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat PKH yang diberikan kepada keluarga miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementerian Sosial, 2021).

1.6.8.1 Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (Kementerian Sosial, 2021) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat.
3. Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
4. Mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan.
5. Pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

1.6.8.2 Kategori Peserta Program Keluarga Harapan

Sasaran penerima PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang termasuk kategori komponen dan terdaftar dalam DTKS. Kriteria komponen dibedakan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/menyusui, anak usia dini dengan rentang usia 0-6 tahun yang belum bersekolah.
- b. Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi, SMP/Mts, SMA/MA.
- c. Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia mulai dari 70 tahun, dan penyandang disabilitas berat.

1.6.9 Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan penulis, menurut (Rachma Maulida, 2022) terdapat hambatan yang berpengaruh dalam kebijakan program keluarga harapan, diantaranya:

1. Hambatan Internal
 - a. Ketidaksinkronan antara data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya.
 - b. Pemutakhiran data.
2. Hambatan Eksternal
 - a. Rendahnya partisipasi dan pemahaman KPM terhadap PKH
 - b. Kendala teknis yang terjadi saat penyaluran bantuan sosial
 - c. Sarana dan prasarana

1.7 Kerangka Berpikir Teoritis



1.8 Operasional Konsep

1.8.1 Evaluasi Program Keluarga Harapan

Evaluasi kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan hasil suatu kebijakan sehingga dapat menilai manfaat yang diperoleh. Berikut indikator evaluasi kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan hasil yang sudah dicapai dari program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
2. Efisiensi merupakan banyaknya usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
3. Kecukupan merupakan pemenuhan kelengkapan dan keperluan yang dibutuhkan penerima bantuan program keluarga harapan dalam komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
4. Pemerataan merupakan pendistribusian kebijakan program keluarga harapan secara merata di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
5. Responsivitas merupakan seberapa memuaskan program keluarga harapan komponen pendidikan pada kelompok sasaran penerima PKH serta sikap pelaksana kebijakan PKH.

6. Ketepatan merupakan manfaat dari kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Tabel 1. 12
Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Evaluasi kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	Efektivitas	a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan
		b. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat.
		c. Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
		d. Mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan.
		e. Pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
	Efisiensi	a. Sumber daya fasilitas
		b. Pendamping PKH
		c. Sumber daya anggaran
	Kecukupan	a. KPM PKH tercukupi kebutuhannya
		b. Pendampingan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
	Pemerataan	a. Pemerataan bantuan PKH yang diberikan
		b. Pemberitahuan pencairan dana bantuan
	Responsivitas	a. Tanggapan dari KPM
		b. Tanggapan dari pelaksana kebijakan
	Ketepatan	a. Ketepatan Manfaat
		b. Dampak kebijakan PKH

Sumber: Diolah Peneliti

1.8.2 Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Hambatan pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dikaji berdasarkan hasil temuan penelitian terdahulu. Hasil temuan penelitian terdahulu bertujuan mengidentifikasi tentang hambatan yang terjadi pada kebijakan PKH, apakah juga terjadi pada pelaksanaan PKH komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hambatan yang sering terjadi kendala teknis yaitu:

1. Hambatan internal yaitu berkaitan dengan faktor yang berasal dari dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Hambatan eksternal yaitu berkaitan dengan faktor yang berasal dari keragaman kelompok sasaran serta luar lingkungan.

Tabel 1. 13
Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon	Hambatan Internal	a) Sinkronisasi antara DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya
		b) Pemutakhiran data
	Hambatan Eksternal	a) Partisipasi dan pemahaman KPM terhadap PKH
		b) Teknis yang terjadi saat penyaluran bantuan PKH
		c) Sarana dan prasarana

Sumber: Diolah Peneliti

1.9 Argumen Penelitian

Pada penelitian ini argumen yang dimiliki peneliti atas masalah yang terjadi dalam evaluasi program keluarga harapan dalam komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang yaitu sumber daya manusia pendamping program keluarga harapan masih belum memadai, terbatasnya pemahaman keluarga penerima manfaat tentang program keluarga harapan, partisipasi anak-anak penerima PKH di jenjang pendidikan masih rendah, keluarga penerima manfaat yang ketergantungan terhadap bantuan program keluarga harapan, sarana dan prasarana pelaksanaan penunjang kegiatan PKH belum memadai. Mengacu pada identifikasi permasalahan yang sudah disebutkan pada latar belakang sebelumnya, peneliti akan menggunakan enam indikator dalam evaluasi kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti juga akan mengkaji lebih dalam mengenai hambatan pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Menurut (Pasolong, 2012) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Administrasi Publik bahwa terdapat tiga tipe penelitian yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan terkait sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Pada penelitian ini terdapat

upaya mendeskripsikan, menganalisa, serta menginterpretasikan situasi kondisi yang sedang terjadi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, namun mendeskripsikan informasi secara objektif.

2. Penelitian Eksplanatori

Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang fokus terhadap hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sehingga penelitian pengujian hipotesa ini biasa disebut dengan *testing research*.

3. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bersifat terbuka, masih belum memiliki hipotesa, masih kurang pengetahuan penelitian terhadap fenomena yang ingin diteliti sehingga penelitian eksploratif ini sering dilakukan sebagai langkah awal untuk penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan rinci.

Pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono, 2012) bahwa penggunaan metode untuk mengetahui keadaan objek bersifat ilmiah, instrumen kuncinya peneliti sendiri, mengumpulkan data dengan teknik triangulasi, serta menganalisis data bersifat kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif memberikan gambaran yang berisikan kalimat tertulis maupun lisan, perilaku hingga kondisi yang terjadi di lapangan terkait kebijakan PKH komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs pada penelitian ini sebagai suatu tempat di mana peneliti dapat mengakses serta memperoleh informasi mengenai keadaan yang sedang terjadi

dari objek yang akan menjadi objek penelitian dengan tujuan mendapat informasi dan data yang diperlukan peneliti. Situs penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Menurut Moleong (2012) subjek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan subjek yang dapat menyampaikan informasi tentang data diperlukan peneliti pada penelitian yang akan diteliti.. Menurut (Sugiyono, 2015) teknik *purposive sampling* merupakan teknik memperoleh sampel dengan suatu pertimbangan dengan berdasarkan standar serta kriteria yang cocok terhadap topik penelitian.

Penulis menerapkan proses menentukan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang memahami fokus penelitian diteliti, terlibat, serta berperan langsung dalam kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan diantaranya informan di tingkat pemerintah daerah kabupaten yaitu kepala bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, koordinator PKH Kabupaten Grobogan, serta informan ditingkat kecamatan yang memahami kondisi PKH yaitu koordinator PKH Kecamatan Pulokulon, pendamping sosial PKH Kecamatan Pulokulon, dan informan selanjutnya masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH komponen pendidikan yang merasakan bantuan program keluarga harapan, serta informan dari perangkat desa setempat.

1.10.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015) bahwa jenis data penelitian terdiri dari data kualitatif, kuantitatif, serta gabungan antar keduanya. Data kualitatif berkaitan dengan kualitas objek penelitian berupa serangkaian informasi tentang fenomena yang sedang diteliti, sedangkan data kuantitatif mengacu pada data angka. Peneliti menggunakan data kualitatif yang menggunakan kata-kata serta kalimat, tidak berupa banyaknya angka meskipun pada pengumpulan data mencari data signifikan seperti tabel, grafik, dan data valid lainnya untuk melengkapi permasalahan maupun penjelasan yang terdapat pada kebijakan PKH komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) sumber data primer merupakan sumber informasi yang disampaikan langsung kepada peneliti dari teknik wawancara informan secara langsung. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan informan terkait yaitu Kabid perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Koordinator PKH Kabupaten Grobogan, Koordinator PKH Kecamatan Pulokulon, Pendamping PKH Kecamatan Pulokulon, serta KPM PKH komponen pendidikan maupun perwakilan perangkat desa yang ada di Kecamatan Pulokulon.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) sumber data sekunder adalah sumber daya yang tidak secara langsung menginformasikan data kepada peneliti melalui dokumen dan studi pustaka. Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai penelusuran untuk menunjang data peneliti yaitu buku cetak, jurnal penelitian terdahulu, situs website resmi instansi Kementerian Sosial serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bank Indonesia, adapun dari website berita Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, dan dokumen resmi instansi seperti data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Grobogan, RPJMD Kabupaten Grobogan, data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan maupun Pendamping PKH Kecamatan Pulokulon sehingga memudahkan peneliti untuk menyusun penelitian ini terkait PKH.

1.10.6 Teknik Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2015) teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan berbagai *setting*, sumber dan cara. Peneliti menentukan teknik pengumpulan dari penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung terhadap gejala yang hendak dilakukan penelitian. Menurut Young dan Schmidt dalam (Pasolong, 2012) bahwa observasi sebagai pengamatan sistematis terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan

mengamati situasi tertentu secara langsung, mencatat perilaku, interaksi, dan aspek-aspek yang relevan serta memperhatikan informan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pertemuan antar dua orang atau lebih sebagai upaya memperoleh informasi melalui sesi tanya jawab. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti saat di lapangan dengan wawancara tidak terstruktur sebagaimana Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa teknik wawancara tidak berstruktur merupakan teknik wawancara yang bebas artinya peneliti tidak menggunakan metode wawancara yang sistematis. Penelitian ini menggunakan pedoman point-point tertentu yang akan ditanyakan pada informan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa gambar, karya-karya monumental, serta tulisan dari seseorang. Dokumentasi sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan merekam informasi visual maupun audio selama observasi atau kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2012) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada

setiap tahapan penelitian sampai tuntas, langkah-langkah analisis ada tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses dalam meringkas, memilah data, mentransformasikan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi di lapangan. Data yang direduksi akan memudahkan peneliti mendapat gambaran jelas untuk menyusun laporan penelitian.

2. Penyajian data

Proses penyajian data pada penelitian kualitatif disajikan dengan mendeskripsikan dengan bentuk uraian dan sejenisnya. Hal tersebut memudahkan peneliti dalam proses memahami apa yang sedang terjadi serta peneliti dapat menganalisis untuk dapat ke tahapan selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini diterapkan oleh peneliti dengan memasukkan data yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah ditelaah. Selanjutnya data tersebut disajikan terstruktur yang kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.10.8 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2015) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada dengan tujuan menguji kredibilitas data. Kualitas data ditunjukkan dengan seberapa besar data yang diperoleh menggambarkan nilai

kebenaran. Menurut Moleong (2014) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, berikut terdapat tiga jenis triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
3. Teknik triangulasi waktu merupakan teknik pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan melakukan wawancara dengan informan terkait evaluasi program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.